




Dinamika Kebijakan Penanganan Pandemi COVID-19 Dalam Perspektif Kesejahteraan Sosial

Darmin Tuwu^{1*} , Bambang Shergi Laksmono² , Abu Huraerah³ , Laode Harjudin⁴ 

¹Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial, FISIP, Universitas Halu Oleo, Kendari, Indonesia

²Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial, FISIP, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia

³Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial, FISIP, Universitas Pasundan, Bandung, Indonesia

⁴Jurusan Ilmu Politik, FISIP, Universitas Halu Oleo, Kendari, Indonesia

*Korespondensi: darmintuwu@gmail.com; Tel: (+62) + 821-9308-2495

Diterima: 15 Juni 2020; Disetujui: 7 Januari 2021; Diterbitkan: 25 April 2021

Abstrak: Wabah virus Corona merubah kebiasaan hidup, pola interaksi dan perilaku masyarakat. Dampaknya sangat besar dan massif, tidak hanya menasar aspek kesehatan tetapi juga bidang ekonomi, psikologi, sosial, politik, pendidikan, budaya, keagamaan, dan sebagainya sehingga perlu dihandel dengan kebijakan pemerintah yang tepat. Artikel memakai metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus ini konsen pada dinamika yang terjadi dalam masyarakat pasca kebijakan terkait COVID-19 diimplementasi. Metode pengambilan data melalui observasi, wawancara, dan analisis konten publikasi media online. Fokus kajian ialah kebijakan pemerintah, respon masyarakat, dan kejadian yang mengikutinya setelah kebijakan diimplementasi dalam periode Maret sampai Agustus 2020 di Kota Kendari. Hasil studi menunjukkan bahwa pasca kebijakan pencegahan penularan COVID-19 diimplementasi muncul dinamika dan kegaduhan dalam masyarakat. Kegaduhan, kepanikan, dan stress tersebut dipicu oleh 3 hal yaitu pertama, instruksi Walikota Kendari yang melarang warga Kota Kendari beraktivitas di luar rumah selama 3 hari secara berturut-turut tanpa jaminan sosial yang jelas; kedua, isu kedatangan Tenaga Kerja Asing asal Tiongkok, dan ketiga, pasien diduga terinfeksi Corona kabur dari ruang isolasi rumah sakit. Respon masyarakat terhadap kebijakan kontroversial pemerintah beragam, mulai dari ketidak-patuhan, melanggar aturan protokol kesehatan, hingga timbul kecemasan dan kegaduhan dalam masyarakat. Agar tidak menimbulkan kegaduhan dan kontroversi, kebijakan pemerintah mestinya dibuat untuk menjawab kebutuhan, menyelesaikan masalah, dan mensejahterakan masyarakat.

Kata kunci: Kebijakan Pemerintah, COVID-19, Kesejahteraan Sosial

Abstract: The Corona virus outbreak changes life habits, interaction patterns and people's behavior. The impact is very large and massive, not only targeting the health aspects but also the economic, psychological, social, political, educational, cultural, religious, etc, so that it needs to deal with proper government policies. The article uses a qualitative method with a case study approach that concentrates on the dynamics that occur in society after the implementation of policies related to COVID-19. Methods of data collection through observation, interviews, and content analysis of online media publications. The focus of the study is government policy, community response, and the events that follow after the policy was implemented in the period March to August 2020 in Kendari City. The results show that after the implementation of the policy to prevent the spread of COVID-19, there will be dynamics and noise in the community. The noise, panic, and stress were triggered by 3 things, first, the Mayor of Kendari's instruction that prohibited Kendari City residents from doing activities outside their home for 3 consecutive days without clear social security; second, the issue of the arrival of foreign workers from China, and third, the patient suspected of being infected with Corona escaped from the hospital isolation room. Public response to controversial government policies has ranged from non-compliance, violating health protocol rules, to anxiety and uproar in the community. In order not to cause uproar and controversy, government policies should be made to answer needs, solve problems, and improve the welfare of society.

Keywords: Government Policy, COVID-19, Social Welfare.

1. Pendahuluan

Dunia dihebohkan dengan kemunculan penyakit Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Coronavirus telah merubah segalanya. Di satu sisi respon pemerintah lambat dalam penanganan karena menganggap virus corona tidak berbahaya, namun di sisi lain penyebaran virus sangat cepat yang menular melalui media tubuh manusia, dan dalam waktu singkat sudah menjangkiti 114 negara, sehingga tanggal 11 Maret 2020 WHO mendeklarasikan COVID-19 sebagai wabah dunia (Sebayang, 2020). Pada tanggal 31 Maret 2020 Pemerintah Indonesia mengumumkan situasi darurat nasional (Bayu, 2020), dan 17 April 2020 ditetapkan sebagai bencana nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020.

Rentang waktu antara pertama kali kasus virus corona dijumpai di Wuhan pada tanggal 31 Desember 2019 dengan pengumuman pemerintah sebagai bencana nasional tanggal 17 April 2020, maka respon pemerintah terbilang lambat karena membutuhkan waktu sekitar tiga bulan lebih baru membuat kebijakan, sementara pergerakan, interaksi, dan mobilitas manusia sebagai pembawa virus sangat cepat dan dinamis, sehingga penyebaran virus corona melalui manusia menjadi tidak bisa dibendung dan sulit dihentikan. Kondisi ini tentunya akan menjadi masalah tersendiri karena virus corona sudah terlanjur menyebar ke dalam masyarakat, sementara tindakan dan kebijakan untuk membatasi dan menghentikan penularan dan penyebaran virus corona belum dibuat oleh pemerintah.

Secara sosiologis, keterlambatan respon pemerintah dalam membuat kebijakan melahirkan kepanikan dalam masyarakat. Membaca perkembangan berita di media online terkait jumlah warga yang terkena infeksi virus corona semakin hari semakin banyak, membuat masyarakat cemas, terancam dan merasa tidak terlindungi akibat keterlambatan respons pemerintah yang menempatkan warga menjadi *vulnerable* terhadap COVID-19 (Almuttaqi, 2020); (Bland, 2020).

Merespon situasi pandemi yang berkembang dalam masyarakat, pemerintah membuat aneka kebijakan dengan menggelontorkan berkali-kali lipat program perlindungan sosial untuk melindungi warga dengan tingkat kesejahteraan ekonomi rendah dari dampak negatif COVID-19 (Syamsulhakim, 2020). Bahkan pemerintah menyiapkan anggaran 110 Triliun rupiah untuk Program Jaring Pengaman Sosial (Karyono, 2020). Namun semua upaya pemerintah tersebut tampaknya belum mampu secara tuntas memecahkan masalah yang ditimbulkan oleh virus corona.

Virus corona sebagai salah satu penyakit berbahaya nan mematikan ini telah menelan banyak korban, berdampak buruk, serta berpengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Tercatat sejak 2 Maret sampai dengan 28 Desember 2020, jumlah positif COVID-19 mencapai 719.219, pasien sembuh 589.978 dan pasien meninggal dunia sebanyak 21.452 orang. Dampak virus corona sangat besar dalam masyarakat, tidak hanya menasar bidang kesehatan, tetapi juga bidang ekonomi, sosial, gaya hidup, budaya, pendidikan, psikologi, politik, agama, dan bidang kehidupan lainnya.

Sejauh ini studi tentang dampak COVID-19 antara lain misalnya dampak COVID-19 pada pekerjaan dan pendidikan (Gudi & Tiwari, 2020), resiko dan ketidakpastian COVID-19 (Brown, 2020), trauma psikologis (Abdullah, 2020), gangguan mental masyarakat (Utami, 2020), serta penderita COVID-19 dikucilkan oleh warga (Sigit, 2020). Adapun studi tentang kebijakan COVID-19 antara lain tulisan tentang kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19 (Tuwu, 2020), kebijakan pemberlakuan *lockdown* sebagai antisipasi penyebaran COVID-19 (Yunus, N.R, 2020), serta respon pemerintah dalam penanganan COVID-19 (Djalante et al., 2020).

Tulisan pertama menunjukkan bahwa dampak virus corona terhadap kehidupan sosial, psikologi, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dll serta tulisan kedua, kebijakan dan respon pemerintah terkait penanganan COVID-19, belum ada tulisan yang secara spesifik membahas tentang dinamika kebijakan penanganan COVID-19 dalam perspektif kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, maka tulisan ini perlu dilakukan untuk mengelaborasi secara mendalam terkait dinamika penanganan pandemi COVID-19 dalam perspektif kesejahteraan sosial dalam level pemerintahan daerah.

1.1. Kebijakan Sosial Penanganan COVID-19

Virus corona merupakan jenis penyakit menular berbahaya dan mematikan yang harus dicari pemecahan masalahnya, antara lain dengan membuat kebijakan pemerintah yang tepat untuk mengatur kehidupan sosial warga agar dapat normal kembali seperti semula. Dengan kebijakan yang tepat membuat pemerintah dapat memenuhi kepentingan publik (Suharto, 2008).

Kebijakan sosial sebagai kebijakan publik terkait dengan urusan kesejahteraan warga negara yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan dasar, mengatasi masalah sosial, melalui pelayanan sosial dan jaminan sosial (Spicker, 1995); (Bridgeman, Peter, 2004).

Kebijakan juga merupakan metode dan instrumen pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup rakyatnya (Bessant, Judith, Robb Watts, Tony Dalton, 2006). Pembuatan kebijakan publik mestinya memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan warga negara, termasuk kebijakan dalam penanganan virus Corona.

Pembuatan kebijakan oleh pemerintah mesti berdampak langsung pada penanganan masalah dan peningkatan kesejahteraan warga negara secara keseluruhan. Dalam hal penerapan kebijakan pembatasan sosial (*social distancing*) untuk mencegah penularan COVID-19, akan menimbulkan biaya sosial dan risiko ekonomi yang harus ditanggung oleh pemerintah. Oleh karena itu, opsi penerapan kebijakan pembatasan sosial harus didukung oleh kemampuan negara dalam memberikan jaminan sosial dan ekonomi bagi warga terdampak (Mas`udi & Winanti, 2020).

Pada konteks wabah COVID-19, pemerintah dalam membuat kebijakan harus memperhatikan segala aspek kehidupan agar tidak menimbulkan kecemasan, keresahan dan kegaduhan dalam masyarakat. Dalam kondisi darurat, pemerintah dituntut untuk melakukan sesuatu yaitu membuat kebijakan untuk mengatasi masalah atau memenuhi kebutuhan warganya (Dye, 2002).

Tulisan ini akan mengetengahkan beberapa kebijakan pemerintah di tingkat lokal terkait penanganan COVID-19, namun dalam implementasinya menimbulkan dinamika dalam kehidupan masyarakat dalam bentuk: pertama, ketidak-patuhan warga pada kebijakan yang dibuat oleh pemerintah; kedua, kebijakan publik buatan pemerintah Kota Kendari menimbulkan kecemasan, serta kurang koordinatif dan ketidak-konsistenan pemerintah terhadap kebijakan yang telah dibuat, dalam periode waktu bulan Maret sampai dengan bulan Agustus 2020.

1.2. Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan (*welfare*) merupakan sebuah kondisi dimana seseorang dalam berbagai level kehidupan sosial, dapat memenuhi kebutuhan sosial-ekonomi, dan dapat mengatasi masalah yang sedang dihadapi (Midgley, 2005). Kata kesejahteraan merupakan kata benda yang menunjukkan keadaan (*condition*) seseorang atau sesuatu yang terpenuhi, tercapai, atau sejahtera. Namun patut dicatat bahwa untuk mencapai kondisi sejahtera, seseorang harus berupaya dan bekerja keras (*hard-work*) semaksimal mungkin untuk menjadi sejahtera, dengan metode intervensi sosial. Dengan kata lain, kondisi sejahtera tidak akan pernah dicapai tanpa ada upaya atau usaha kerja keras dari seorang individu, keluarga, kelompok, masyarakat untuk menjadi sejahtera.

Konsep kesejahteraan (sosial) ada yang bersifat statis (kondisi, tujuan) dan ada pula yang bersifat dinamis. Definisi statis merupakan definisi undang-undang kesejahteraan sosial, sementara definisi dinamis merujuk pada pendapat para ahli dan pakar kesejahteraan sosial. Definisi kesejahteraan sosial yang dinamis, menyatakan bahwa kondisi sejahtera itu merupakan kondisi yang diusahakan, kondisi yang harus dicapai, atau kondisi yang dicita-citakan oleh semua orang dalam kehidupan sosial mereka. Merujuk pada *Oxford Dictionary* (Manser, 1995) bahwa kesejahteraan (*welfare*) itu terkait dengan tiga hal yaitu kenyamanan (*comfort*), kesehatan (*health*), dan kebahagiaan (*happiness*). Ketiga hal esensial tersebut dicari keberadaannya dan diinginkan oleh semua orang, baik dia sebagai individu, keluarga, atau masyarakat secara keseluruhan. Fakta dalam kehidupan sosial kita menjumpai bahwa semua orang berjuang keras, rela berkorban waktu, tenaga, dan uang untuk mendapatkan kenyamanan, kesehatan, dan kebahagiaan (*welfare*).

Kaitan kesejahteraan sosial dengan tulisan ini didasari pada argumentasi bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah selaku pemimpin dan aktor kesejahteraan mempunyai kewajiban untuk

Darmin Tuwu, Bambang Shergi Laksmono, Abu Huraerah, Laode Harjudin

Dinamika Kebijakan Penanganan Pandemi COVID-19 Dalam Perspektif Kesejahteraan Sosial

menciptakan keamanan, kenyamanan, kesehatan, dan kebahagiaan warga yang dipimpinnya, serta mengatasi masalah yang sedang terjadi melalui pembuatan kebijakan yang tepat. Dalam faktanya, kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Kota Kendari yang semula bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona, justru menimbulkan kontroversi dalam kehidupan sosial, kegaduhan, kepanikan bahkan stress, karena kurang memperhatikan kondisi psikologis dan mengabaikan kesejahteraan sosial masyarakat.

Berdasarkan pada fakta lapangan dan peristiwa-peristiwa (*events*) yang terjadi dalam masyarakat terkait dengan implementasi kebijakan COVID-19 yang menimbulkan kontroversi, artikel ini bermaksud mengeksplorasi dinamika yang terjadi dalam masyarakat pasca kebijakan pemerintah terkait COVID-19 diimplementasi di Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara. Dinamika sosial terjadi ketika masyarakat merespons kebijakan pemerintah yang memicu terjadinya keresahan, kepanikan, keributan, kegaduhan, dan bahkan stress sosial. Kebijakan kontroversial pemerintah yang memicu terjadinya kegaduhan sosial tersebut akan ditulis secara sistematis dan berurutan berdasarkan periode waktu terjadinya yaitu: pertama, Surat Walikota Kendari yang melarang warganya beraktivitas di luar rumah selama tiga hari dari tanggal 10-12 April 2020 tanpa jaminan sosial yang jelas; kedua, Pasien diduga positif-Corona kabur dari Ruang Isolasi Rumah Sakit Bahtera Mas Kendari, dan terakhir, isu kedatangan 500 Tenaga Kerja Asing asal Tiongkok di Sulawesi Tenggara di saat warga berjuang keras melawan virus corona. Ketiga isu krusial tersebut akan ditulis secara detail dalam bagian hasil dan pembahasan.

2. Metode

Tulisan yang mengambil setting wilayah Pemerintah Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara ini merupakan penelitian kualitatif dengan studi kasus sebagai teknik pendekatannya (Yin, 2008). Teknik pengambilan informasi melalui pengamatan dan interview. Obyek kajian adalah kebijakan pemerintah terkait COVID-19, rentetan kejadian-kejadian yang menyertainya pasca pembuatan aturan, serta hasil olahan publikasi media online, termasuk di dalamnya whatsapp group periode awal Maret sampai Agustus 2020.

Informasi yang sudah dikumpulkan di lapangan selanjutnya diinterpretasi secara naratif-deskriptif. Proses analisis informasi dilakukan sejak proses awal pengumpulan data lapangan hingga proses akhir yaitu analisis dan interpretasi untuk menjawab tujuan penulisan, yaitu dengan cara menarasikan data yang telah dianalisis untuk menjawab masalah dan tujuan penelitian (Neuman, 2006). Selanjutnya, untuk menjamin keabsahan data dilakukan teknik triangulasi.

3. Hasil

Dalam konteks pencegahan meluasnya penularan virus corona dan penanganan pandemi COVID-19 dalam masyarakat, pemerintah daerah merespon dengan membuat kebijakan. Dalam membuat kebijakan penanganan COVID-19, pemerintah mesti memperhatikan banyak aspek kehidupan sosial supaya tidak muncul ketegangan, kegaduhan dan gesekan dalam masyarakat. Pemerintah pusat dan daerah juga mesti memperhatikan kondisi psikologis, sosial, dan ekonomi masyarakat, supaya performa, kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga dan terjamin meski dalam keadaan pandemi.

Berikut ini akan diuraikan beberapa isu dan kebijakan pemerintah Kota Kendari berkaitan dengan pencegahan penularan dan penanganan COVID-19, yang sempat meresahkan masyarakat Kota Kendari di tengah perjuangan warga melawan pandemi COVID-19, pada periode awal bulan Maret hingga bulan Agustus 2020.

3.1. Instruksi Walikota Kendari Tentang Larangan Keluar Rumah Selama Tiga Hari

Sejak pertama kemunculan virus corona yakni awal Maret 2020 sampai sekarang, jumlah orang terinfeksi Corona di seluruh dunia terus bertambah, tidak hanya di Jawa tetapi juga di Kota Kendari.

Menyikapi hal tersebut, dan untuk mencegah dan memutus penyebaran virus corona yang terus meningkat dalam masyarakat, Walikota Kendari Sulikarnain Kadir, tanggal 8 April 2020 mengeluarkan Surat Instruksi Walikota Kendari Nomor 443.1/1233/2020 Tentang Melakukan Total Aktivitas di Dalam Rumah Selama Tiga Hari (10-12 April 2020) Dalam Rangka Memutus Mata Rantai Penyebaran Virus corona Disease (COVID-19) di Kota Kendari., n.d.). Isi Surat Instruksi Walikota Kendari memuat tiga hal utama yaitu: "Poin Pertama, melarang warga melakukan aktivitas di luar rumah selama tiga hari mulai tanggal 10 hingga 12 April 2020. Poin Kedua, warga yang melanggar akan dilakukan pengamanan oleh pihak TNI dan kepolisian. Poin Ketiga, selalu menerapkan protokol kesehatan baik di rumah maupun di luar rumah".

Tabel 1. Surat Instruksi Walikota Tentang Larangan Beraktivitas di Luar Rumah Selama Tiga Hari

Kebijakan Pemerintah	Sumber Kontroversi	Respon Warga	Waktu
Surat Instruksi Walikota Kendari Nomor 443.1/1233/2020 Tentang Melakukan Total Aktivitas di Dalam Rumah Selama Tiga Hari (10-12 April 2020) Dalam Rangka Memutus Mata Rantai Penyebaran COVID-19 di Kota Kendari.	- Pemerintah Kota Kendari tidak menyediakan jaminan sosial/perlindungan sosial kepada warga (miskin). -Mengancam warga yang melanggar akan dilakukan pengamanan oleh pihak TNI dan kepolisian.	- Protes dan menolak. - Tetap bekerja di luar rumah meski ditahan polisi. - Warga lebih khawatir dapur tidak berasap ketimbang tertular corona. - Tidak mengikuti perintah walikota. - Terjadi <i>panic buying</i> di pasar dan pusat-pusat perbelanjaan. -Warga berkerumun dan berdesakan di pasar dan shopping center.	9-12 April 2020

Pasca keluarnya surat walikota tersebut, pada tanggal 9 April 2020, sebagai respon masyarakat atas pelaksanaan Surat Walikota tersebut, terjadi keresahan dan kepanikan yang meluas di masyarakat. Kepanikan dan suasana gaduh seperti ini belum pernah terjadi di era pemerintahan sebelumnya di Kota Kendari.

Suasana hati dan kondisi psikologis warga masyarakat pasca keluarnya Instruksi Walikota Kendari yang mana isi surat tersebut adalah melarang warga Kendari beraktivitas di luar rumah selama tiga hari secara berturut-turut yaitu mulai dari tanggal 10 April sampai dengan tanggal 12 April 2020, dapat disimak dari penuturan salah seorang informan penelitian berikut ini. Untuk mengetahui secara riil keadaan dan respon warga Kota Kendari, berikut ini akan diketengahkan salah seorang informan penelitian bernama La Foto (umur 49 tahun), dia bekerja sebagai penjual roti keliling, menggunakan sepeda motor yang dijual ke warung-warung pelanggan di wilayah Kecamatan Kambu, Kecamatan Poasia, Kecamatan Abeli, Kecamatan Nambo, Kecamatan Wua-Wua dan Kecamatan Baruga. Melalui pekerjaan menjual roti keliling ini dia bisa memperoleh pendapatan untuk menghidupi dan memenuhi kebutuhan hidup keluarganya sehari-hari. Berikut penuturannya.

Begini pak, menurut saya sebagai warga masyarakat penjual roti keliling yang bukan PNS begini merasa tidak setuju pak. Mengapa? Karena bagi kami warga biasa, kalau dilarang keluar rumah, berarti saya tidak bisa bekerja, artinya saya tidak bisa pergi menjual roti lagi. Kalau begitu, jadi bagaimana nasib keluarga saya, bagaimana anak dan istri saya bisa makan. Kalau saya dilarang keluar rumah berarti secara otomatis saya tidak bekerja. Kalau saya tidak bekerja, otomatis saya tidak akan mendapatkan uang. Kalau saya tidak dapat uang, bagaimana saya harus menghidupi anak-anak dan istri saya. Mereka butuh makan dan minum, dan kebutuhan ini-itu setiap hari. Kalau saya tidak bekerja, bagaimana saya dapat membayar sewa rumah, bayar cicilan motor, bayar uang sekolah anak-anak, beli kebutuhan hidup ini dan itu. Banyak sekali kebutuhan pak, bapak tau sendiri kan? Kalau tidak bekerja bagaimana dapur bisa berasap? Adaa jaminan dari pemerintah saja belum tentu cukup pak, apalagi tidak ada. Coba bapak bayangkan

itu kasian. Jadi intinya kalau saya tidak keluar rumah berarti saya tidak bisa dapat uang. Bagi saya pak, biar ada Virus Corona saya tidak peduli dan saya tidak takut. Saya lebih takut kalau anak dan istriku kelaparan karena tidak ada makanan di rumahku.” (Wawancara dengan La Foto tanggal 9 April 2020).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak La Foto tersebut, dapat diketahui bahwa warga Kendari tidak setuju dengan instruksi walikota dan bahkan cenderung menolak Surat Walikota Kendari. Penolakan warga didasarkan pada alasan bahwa kalau warga dilarang beraktivitas di luar rumah, itu sama saja artinya dengan warga disuruh berhenti bekerja. Kalau warga tidak bekerja, otomatis mereka akan kehilangan pekerjaan dan pendapatan. Kalau warga dilarang bekerja di luar rumah, lalu siapa yang akan menjamin dan menanggung beban dan kebutuhan hidup rumah tangga mereka sehari-hari? Kondisi ini pada akhirnya akan membuat keadaan warga utamanya warga golongan keluarga-miskin yang kurang mampu secara ekonomi, akan semakin buruk dan akan semakin terpuruk kehidupannya. Bahkan dalam jangka panjang dikhawatirkan golongan kurang mampu ini, jika mereka tidak mendapat bantuan sosial, tidak ada jaminan sosial, dan tidak mempunyai perlindungan sosial, maka diprediksi mereka akan masuk dalam jurang kemiskinan yang terdalam.

Instruksi walikota terkait kebijakan larangan keluar rumah juga mendapat protes dan penolakan dari kelompok warga yang sehari-harinya bekerja sebagai penjual ikan keliling. Protes kelompok warga penjual ikan keliling ini tidak diperlihatkan dalam bentuk demonstrasi massa turun di jalan raya, tetapi ditunjukkan melalui penolakan warga atau ketidak patuhan warga terhadap himbauan pemerintah. Meskipun pemerintah melarang warga beraktivitas di luar rumah selama tiga hari, namun warga tidak patuh dan tidak takut pada virus Corona. Secara psikososial, kondisi kejiwaan kelompok warga penjual ikan keliling justru merasa terganggu jika mereka dilarang keluar rumah dan disuruh tinggal dan beraktivitas di dalam rumah.

Sikap dan respon kelompok warga penjual ikan keliling terkait dengan Surat Walikota Kendari yang melarang warganya beraktivitas di luar rumah selama tiga hari, dapat disimak dalam wawancara dengan Wa Iba (37 tahun), salah seorang penjual ikan keliling di Kota Kendari berikut ini.

“Bagaimana tanggapan Ibu mengenai Surat Walikota Kendari yang melarang warga beraktivitas di luar rumah selama tiga hari secara berturut-turut? Saya tidak tahu aturan kasian pak, tapi saya ini setiap hari harus bekerja menjual ikan supaya bisa beli makanan, saya kerja supaya anak saya bisa bayar uang sekolah, dan supaya saya bisa bayar kebutuhan rumah tangga lainnya. Kalau saya dilarang keluar rumah, bagaimana mi saya itu? Pasti perut lapar itu. Saya bingung harus bilang apa. Yang pasti saya tidak setuju kalau saya dilarang keluar rumah. Kalau saya tidak kerja jual ikan, bagaimana kehidupan saya. Siapa yang akan tanggung kebutuhan hidup kami. Tidak mungkin pemerintah mau bantu kami ini. Biar ada virus Corona saya tidak takut (Wawancara dengan Wa Iba tanggal 9 April 2020)”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Wa Iba (*ina-ina* penjual ikan keliling) yang mewakili kelompok masyarakat kelas bawah, dapat diketahui bahwa warga masyarakat kelas bawah yang tidak mempunyai penghasilan tetap selain bekerja, akan merasa keberatan kalau mereka disuruh tinggal di rumah. Mereka keberatan dengan larangan pemerintah karena hanya melalui bekerja di luar rumah mereka bisa mendapatkan penghasilan, misalnya dengan menjual ikan keliling dari rumah ke rumah. Bagi kelompok masyarakat kategori kelas ekonomi bawah seperti Ibu Wa Iba, faktor sosial dan faktor ekonomi jauh lebih penting dibandingkan dengan faktor kesehatan yaitu kekhawatiran akan tertular virus corona.

Meskipun media massa dan media online setiap saat ramai memberitakan perkembangan jumlah warga Kendari yang terpapar virus corona semakin hari semakin meningkat jumlahnya, namun bagi mereka tidak penting. Bagi kelompok masyarakat miskin seperti: *driver*, ojek offline dan online, buruh, nelayan, petani, penjual asongan, pekerja serabutan, karyawan toko, penjual roti, penjual ikan keliling, penjual sayur, pedagang kaki lima, dan pekerja sektor informal lainnya, yang paling penting bagi mereka adalah bagaimana mereka bisa tetap bekerja sehingga mereka dapat memperoleh penghasilan

berupa uang, karena dengan uang tersebut mereka dapat berbelanja menghidupi anak, isteri dan anggota keluarga lainnya. Ada jaminan hidup dari pemerintah saja mereka akan tetap bekerja di luar rumah, apalagi jika tidak ada jaminan sama sekali. Bahkan diancam akan ditahan oleh Polisi pun, warga tidak takut, dan mereka tetap keluar beraktivitas di luar rumah.

Terkait dengan ancaman pemerintah bahwa TNI/Polri akan menahan atau mengamankan warga yang kedapatan beraktivitas di luar rumah (poin kedua surat Walikota Kendari), warga masyarakat melanggar, tidak patuh dan tidak peduli dengan kebijakan dan ancaman tersebut. Sebagaimana diutarakan oleh salah satu warga masyarakat berikut ini.

“Mengapa Bapak masih beraktivitas di luar rumah, padahal sudah ada larangan dari pemerintah? Apakah Bapak tidak takut kalau ditangkap sama TNI/Polri? Aduh, bagaimana di pak, ini bukan persoalan takut atau tidak takut Polisi, tapi ini menyangkut hak hidup kami. Coba Bapak bayangkanlah, pemerintah suruh warga tinggal di rumah saja, dan melarang beraktivitas di luar rumah. Ini sama saja dengan menghukum kami. Kami ini warga miskin kasian. Kalau kami hanya tinggal di rumah, bagaimana kami bisa cari makan, membawa orang sakit, membeli bahan makanan, dan urusan sosial kemasyarakatan penting lainnya. Karena itu, kami tetap keluar rumah meski kami harus berhadapan dengan Polisi kami tidak takut (Wawancara dengan Bapak Anduri, tanggal 10 April 2020)”.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Anduri bahwa warga masyarakat masih memperlihatkan sikap menolak, protes, melanggar aturan, dan sikap tidak patuh pada kebijakan pemerintah, meskipun sudah diancam akan ditahan oleh Polisi, tapi warga masyarakat tetap ngotot keluar rumah untuk mencari penghidupan. Fenomena resistensi masyarakat terhadap larangan keluar rumah selama tiga hari secara berturut-turut tidak hanya ditunjukkan oleh warga kelas bawah, tetapi juga diperlihatkan oleh warga kelas menengah ke atas. Alasan penolakan warga masyarakat kelas bawah didasari oleh alasan ekonomi, sementara kelompok masyarakat menengah ke atas lebih disebabkan oleh alasan non-ekonomi, seperti bertemu teman, kolega, mengunjungi keluarga, dan urusan-urusan sosial budaya lainnya.

3.2. Pasien Diduga Positif-Corona Kabur Dari Ruang Isolasi Rumah Sakit Bahtera Mas

Persoalan kedua yang menimbulkan kegaduhan dan kecemasan masyarakat yaitu terkait dengan kaburnya pasien diduga positif virus Corona dari ruang isolasi Rumah Sakit Bahterammas Kendari. Pasien yang kabur tersebut bernama Udin (36 tahun), dia berasal dari Kabupaten Konawe Utara. Setelah pasien kabur, yang paling dikhawatirkan masyarakat adalah pasien tersebut pergi ke tempat tinggal keluarga besarnya di Kendari atau pergi mengunjungi tempat-tempat keramaian seperti pasar, mall, dan tempat hiburan lainnya, sehingga dia berpotensi besar menularkan virus Corona kepada orang lain. Namun ternyata pasien tersebut memilih kembali ke kampung halamannya untuk mengisolasi diri di kebun miliknya. Setelah mendapat informasi bahwa pasien yang melarikan diri berada di kebun, Bupati Konawe Utara Ruksamin bersama rombongan akhirnya datang menjemput Udin. Saat datang dijemput, Udin tidak melawan dan langsung menyerahkan diri. Ini adalah sikap yang harus diapresiasi.

Berita tentang kaburnya Udin dari Ruang isolasi Rumah Sakit Bahtera Mas Kendari diperoleh dari media online seperti <https://regional.inews.id/>, <https://www.cnnindonesia.com/>, telisik.id, merdeka.com, dan lain-lain. Berita kaburnya Udin dari Ruang Isolasi Rumah Sakit Bahtera Mas juga banyak beredar di media sosial khususnya WhatsApp Group.

Alasan pasien melarikan diri dari ruang isolasi Rumah Sakit Bahterammas adalah karena dia merasa takut tertular virus Corona karena dia digabung bersama pasien positif corona di ruang isolasi, sementara dia sendiri belum tentu positif Corona. Sampai Udin dibawa ke Rumah Sakit, belum ada hasil tes swab yang menunjukkan bahwa Udin positif corona. Inilah persoalannya.

Tabel 2. Pasien Diduga Positif-Corona Kabur Dari Ruang Isolasi Rumah Sakit Bahtera Mas

Kebijakan Pemerintah	Sumber Kontroversi	Respon Warga	Waktu
Pemerintah mengisolasi warga yang diduga positif corona.	<ul style="list-style-type: none"> - Udin (36 tahun) warga diduga positif corona diisolasi di Ruang Isolasi RS Bahtera Mas Kendari. - Ketika masuk ruang isolasi belum ada hasil laboratorium yang menunjukkan bahwa Udin positif corona (statusnya masih Pasien Dalam Pengawasan-PDP). - Udin digabung di ruang isolasi bersama-sama dengan pasien lama positif corona. 	<ul style="list-style-type: none"> - Menolak diisolasi sebelum ada hasil laboratorium bahwa Udin positif corona. - Menolak diisolasi satu ruangan bersama-sama dengan pasien positif corona. - Udin merasa khawatir dan takut jangan sampai dia ketularan COVID-19. - Karena merasa takut, akhirnya Udin memutuskan untuk kabur dari ruang isolasi RS Bahtera Mas. 	28 April 2020

Kasus kaburnya pasien di atas menunjukkan bahwa Udin dilanda perasaan cemas bahkan perasaan takut saat diisolasi di ruang isolasi lalu digabungkan dengan pasien corona, sementara Udin sendiri belum tentu positif corona. Tindakan Udin merupakan bentuk kekhawatiran, ketakutan, dan bahkan perlawanan agar tidak tertular COVID-19. Kalau pemerintah langsung menangkap warga lalu mengkarantina di Rumah Sakit sebelum ada hasil positif corona, tentunya hal ini akan menimbulkan trauma baru bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Sebelum ada hasil tes swap yang menunjukkan bahwa seseorang positif Corona, tidak boleh melakukan penangkapan dan karantina warga. Perbuatan main tangkap tanpa bukti jelas akan mengganggu psikologis dan kesejahteraan sosial masyarakat.

3.3. Isu Kedatangan 500 Tenaga Kerja Asing asal Tiongkok di Sulawesi Tenggara

Kebijakan pemerintah berikutnya yang menimbulkan kecemasan, keresahan, gesekan sosial, kegaduhan, dan kontroversial di tengah perjuangan masyarakat melawan COVID-19 adalah kebijakan terkait dengan rencana kedatangan 500 Tenaga Kerja asal Tiongkok di Kendari. Di satu sisi pemerintah telah melarang orang pulang kampung (*mudik lebaran*), tetapi di sisi lain pemerintah malahan mengizinkan 500 orang tenaga kerja asal Tionghoa masuk ke Sulawesi Tenggara. Sikap ambigu pemerintah yang dinilai aneh, tidak peduli, diskriminatif, dan bisa memicu terjadinya konflik horizontal dalam masyarakat. Pemerintah telah membuat kebijakan pelarangan mudik lebaran, seharusnya pemerintah juga harus melarang masuknya tenaga kerja asing asal Tiongkok masuk ke Sulawesi Tenggara di tengah pandemi COVID-19.

Terkait dengan kebijakan pemerintah yang mau menerima kedatangan 500 orang Tenaga kerja Asing asal Tiongkok di Kendari, Sulawesi Tenggara, yang akan bekerja di Perusahaan tambang Konawe, dapat disimak dari penuturan salah satu warga masyarakat berikut ini.

"Bagaimana pendapat Bapak terkait kebijakan pemerintah yang mau menerima kedatangan 500 orang TKA asal Tiongkok di Kendari, Sulawesi Tenggara, yang nanti mereka akan bekerja di Perusahaan Tambang Konawe? Begini pak, saya tidak setuju dengan kebijakan pemerintah. Pemerintah itu harus bisa bersikap adil, tidak diskriminatif, konsisten, dan bisa membaca kondisi mental-psikologis dan keadaan masyarakat secara umum. Masyarakat kita sekarang masih berjuang keras supaya tidak tertular virus corona. Masyarakat dilarang pulang kampung masyarakat menerima demi kebaikan bersama, tapi kenapa dalam keadaan krisis seperti sekarang

Darmin Tuwu, Bambang Shergi Laksmono, Abu Huraerah, Laode Harjudin
Dinamika Kebijakan Penanganan Pandemi COVID-19 Dalam Perspektif Kesejahteraan Sosial

ini pemerintah mau mendatangkan 500 orang TKA asal China. Kita tahu juga bahwa virus corona itu berasal dari Wuhan-China. Jadi masyarakat merasa takut, jangan sampai dengan kedatangan 500 orang China tersebut malah banyak warga yang terkena virus corona (Wawancara dengan Bapak Kamaruddin, tanggal 2 Mei 2020)".

Tabel 3. Isu Kedatangan 500 Tenaga Kerja Asing asal Tiongkok di Sulawesi Tenggara

Kebijakan Pemerintah	Sumber Kontroversi	Respon Warga	Waktu
Pemerintah menerima kedatangan 500 TKA asal Tiongkok yang akan bekerja di tambang Konawe Sulawesi Tenggara.	<ul style="list-style-type: none"> - Warga tengah keras melawan penyebaran COVID-19 yang terus meningkat. - Warga takut tertular virus corona yang dibawa oleh TKA China. - Pemerintah lebih mengedepankan alasan ekonomi ketimbang psikologis masyarakat. - Warga dilarang mudik lebaran. 	<ul style="list-style-type: none"> - Terjadi protes dan penolakan secara luas dalam masyarakat. - Penolakan bukan hanya datang dari warga tetapi juga anggota DPR-RI, DPRD, Bupati Konawe, Gubernur Sultra. - Pemerintah mengabaikan aspirasi dan kondisi psikologis warga. - Terjadi demonstrasi penolakan massa di Bandara Haluoleo, Kantor Bupati, dan tempat-tempat umum lainnya. - Di media sosial utamanya WhatsApp Group banyak beredar video penolakan kedatangan 500 orang TKA China. 	Mei-Juni 2020

Berdasarkan wawancara dengan salah seorang informan di atas diketahui bahwa warga tidak setuju dengan kebijakan pemerintah yang menerima kedatangan 500 orang TKA asal China, dikarena takut ketularan virus corona. Dalam kasus COVID-19, pemerintah harus mampu membaca psikologi masyarakat, bahwa virus corona itu berasal dari Wuhan China. Di tengah perjuangan masyarakat mencegah dan melawan virus Corona, sebaiknya pemerintah jangan dulu menerima orang pembawa virus corona. Meski masuknya pekerja asing tersebut telah memenuhi regulasi terkait penggunaan TKA (www.reformasinews.com, 2020), namun sebaiknya pemerintah menunda terlebih dahulu kedatangan pekerja asing tersebut sampai pandemi COVID-19 benar-benar berakhir.

Akibat kebijakan kontroversial pemerintah pusat tersebut, pada awal Mei 2020 sempat terjadi protes dan demonstrasi besar di masyarakat. Yang melakukan protes terhadap kedatangan Tenaga Kerja Asing bukan hanya masyarakat, tetapi juga anggota DPR RI, Bupati Konawe dan Gubernur Sulawesi Tenggara. Seluruh komponen masyarakat Sulawesi Tenggara kompak dan bersatu-padu dalam satu kelompok besar yaitu satu suara menolak kedatangan Tenaga kerja asal China di Sulawesi Tenggara.

Sebagai bentuk penolakan warga, di media sosial WhatsApp Group beredar video Bupati Konawe sedang menggelar latihan fisik bersama Timnya Satuan Pengamanan Polisi Pamong Praja (Pol-PP) untuk mempersiapkan aksi turun ke jalan jika nanti Tenaga Kerja Asing asal China benar-benar akan datang ke Konawe. Begitu pula pernyataan dan penolakan keras datang dari anggota DPR Pusat dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten, bahwa mereka semua menolak dan akan siap dan rela memimpin demonstrasi massa turun ke jalan raya untuk mengungkapkan sikap penolakan terhadap kedatangan Tenaga Kerja Asing asal China dari Sulawesi Tenggara.

Berkembangnya isu dalam masyarakat terkait penolakan kedatangan 500 orang Tenaga Kerja Asing asal China, serta setelah pemerintah pusat mendapat kritik tajam, protes, dan penolakan keras dari seluruh komponen masyarakat Sulawesi Tenggara, kebijakan ekonomi pemerintah menerima masuknya 500 orang tenaga kerja asal Tiongkok di masa pandemi ditunda. Namun karena alasan ekonomi yang menguat dari Pemerintah Pusat, bulan depannya yaitu bulan Juni 2020, akhirnya 500

orang Tenaga Kerja Asing asal Tiongkok tersebut tetap datang dan masuk di Konawe Sulawesi Tenggara untuk dipekerjakan di Perusahaan Tambang.

4. Pembahasan

Berkaitan dengan instruksi Walikota Kendari yang mengeluarkan Surat agar warga Melakukan Total Aktivitas di Dalam Rumah Selama Tiga Hari yaitu tanggal 10-12 April 2020, dengan tujuan untuk Memutus Mata Rantai Penyebaran Viruscorona Disease di Kota Kendari. Sebenarnya maksud surat ini bagus yaitu "Memutus Mata Rantai Penyebaran Viruscorona Disease di Kota Kendari", namun karena tidak didukung dengan infrastruktur penunjang dan kerjasama dengan stakeholders terkait, serta tidak memperhatikan kondisi psikososial, budaya, dan ekonomi masyarakat, sehingga surat ini akhirnya menjadi kontroversi. Pasca keluarnya surat instruksi Walikota Kendari mengapa sampai terjadi gelombang kecemasan dan kegaduhan dalam masyarakat? Jawabannya karena surat walikota tersebut secara administratif, secara sosial, dan secara substantif bertentangan dengan kebijakan pemerintahan provinsi dan kebijakan pemerintah pusat serta bertentangan dengan kondisi psikososial masyarakat Kendari.

Secara administratif surat Walikota Kendari bertentangan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Kebijakan tinggal di rumah (*stay at home*) dan beraktivitas di rumah (*work from home*) secara total hanya cocok diberlakukan untuk warga yang bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan kategori daerah zona merah seperti Jakarta, karena faktanya sampai surat ini dikeluarkan Kota Kendari masih berada dalam kategori daerah "zona hijau", dan warganya masih banyak yang bekerja sebagai non-ASN. Sebagai bahan perbandingan saja misalnya, Jakarta sendiri sebagai ibu kota negara yang padat penduduk tidak serta-merta menerapkan kebijakan *total lockdown* atau melarang warganya beroperasi dan bekerja di luar rumah, apalagi Kota Kendari yang hanya berstatus sebagai kota kecil.

Diduga kuat pembuatan surat ini dilakukan secara tergesa-gesa, tidak melibatkan stakeholders lainnya, tidak memperhatikan kondisi kawasan, serta tidak memahami suasana sosial, psikologis, budaya, dan ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Akibatnya muncul protes di mana-mana. Seluruh komponen masyarakat memprotes dan tidak patuh pada himbuan isi walikota Kendari. Bahwa ancaman Pemerintah Kota Kendari terhadap warganya yang masih tetap beraktivitas di luar rumah pada tanggal 10-12 April 2020 akan ditangkap (diamankan) oleh pihak TNI/Polisi, ternyata tidak mendapat tanggapan positif dari pihak TNI dan Polri (Sultranews.co.id, 2020) disebabkan karena tidak ada koordinasi dengan pihak keamanan sebelumnya. Setelah surat walikota tersebut terbit dan beredar luas di media sosial (WhatsApp Group), Kapolres Kendari Didik Erfianto mengklarifikasi bahwa "Polisi tidak akan menangkap dan melakukan tindakan represif kepada warga yang beraktivitas di luar rumah. Mereka hanya akan melakukan imbauan melalui patroli keliling terkait pencegahan penularan COVID-19. Sehingga masyarakat tidak perlu merasa resah dan tidak perlu ribut karena polisi tidak akan menangkap orang yang beraktivitas di luar rumah. Hal ini membuktikan bahwa pembuatan Surat Walikota Kendari tidak melibatkan dan tidak berkoordinasi dengan pihak TNI/Polri sebelumnya.

Akibat dari keluarnya surat Wali Kota Kendari tanggal 8 April 2020, maka pada tanggal 9 April 2020, terjadi keramaian besar, terjadi kerumunan massal, dan terjadi antrian panjang pembeli di pasar-pasar tradisional dan di pusat-pusat perbelanjaan di Kota Kendari. Pemandangan membludaknya pembeli ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Beberapa pasar tradisional seperti Pasar Anduonohu, Pasar Lapulu, Pasar Baruga, Pasar Wua-Wua, Pasar Panjang, Pasar Mandonga, Pasar Kota Lama hingga Tempat Penjualan Ikan (Tempat Pelelangan Ikan) dipenuhi oleh pembeli. Pembeli penuh sesak, berdesak-desakan, terjadi kerumunan massal di pasar dan pusat perbelanjaan disebabkan oleh adanya kabar bahwa pasar akan ditutup selama tiga hari berturut-turut dari tanggal 10-12 April 2020. Makanya warga segera berlomba-lomba berbelanja memadati pasar-pasar dan pusat-pusat perbelanjaan. Barang yang paling banyak diburu oleh pembeli adalah bahan makanan pokok, sayur mayur dan ikan untuk persediaan hidup selama 3 hari. Komoditas yang paling laris dan paling banyak diburu pembeli adalah ikan. Semua pasar tradisional kehabisan stok ikan, bahkan ikan yang tidak laku pada hari-hari biasa

sebelumnya, pada hari itu semua jenis ikan habis laku terjual. Semua ikan yang ada di pasar ikan ludes terjual, termasuk ikan yang dijual di pelelangan. Ironisnya, seiring dengan banyaknya pembeli, harga ikan pun naik menjadi mahal dua kali lipat dari harga hari-hari sebelumnya. Anehnya, meski pun harga ikan mahal, namun pembeli tetap saja ngotot membeli ikan karena khawatir besok, lusa, dan tiga hari ke depan pasar akan tutup. Karena pasar akan tutup berturut-turut selama tiga, maka warga panik dan berbondong-bondong mendatangi pasar lalu memborong bahan sembilan bahan pokok di pasar.

Begitu pula dengan pusat-pusat perbelanjaan yang ramai dan dipadati oleh pembeli. Pada tanggal 9 April 2020, dari pagi hingga malam hari, beberapa pusat perbelanjaan di Kendari seperti Marina, Mega Matahari, Megros, Indogrosir, terlihat ramai-padat dan tampak antrean panjang pembeli, bahkan saking panjangnya antrean pembeli sampai terjadi keadaan "*panic buying*" yaitu kondisi kepanikan psikologis yang dialami oleh para pembeli yang memadati pusat-pusat perbelanjaan secara bersamaan karena khawatir akan kehabisan stok barang yang akan dibeli. Kondisi ini tentunya sangat ironis dan memprihatinkan, karena pada saat yang bersamaan masih diberlakukan aturan kebijakan pemerintah *social distancing* dan *physical distancing* untuk mencegah meluasnya penyebaran virus corona. Karena sudah terjadi keramaian massa dan *panic buying*, aturan pemerintah untuk menjaga jarak pun "dilanggar" tidak bisa lagi diikuti dan dipatuhi oleh masyarakat. Hasil observasi di lapangan menunjukkan bahwa antrian panjang dan keramaian pembeli di pasar dan pusat-pusat perbelanjaan seolah-olah menunjukkan keadaan bahwa dunia akan berakhir, seolah-olah tidak ada lagi hari esok, sehingga warga rela dan pasrah untuk memaksakan diri berdesak-desakan membentuk kerumunan massal di pasar dan pusat-pusat perbelanjaan.

Setelah surat kontroversi Walikota dikeluarkan, yang isinya meminta warga untuk tinggal di rumah selama tiga hari, secara spontan warga merespon dengan protes, komplain, kritik keras dan penolakan. Yang melakukan protes dan kritik tajam bukan hanya warga tetapi juga anggota DPR RI. Kritik dari masyarakat mengatakan bahwa surat walikota akan menimbulkan dampak psikososial, sedangkan kritik dari DPR menilai bahwa kebijakan Walikota Kendari tersebut dianggap konyol karena secara substantive isi surat tersebut bertentangan dengan kebijakan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

Setelah mendapat gelombang protes dan kritik dari masyarakat, pada tanggal 10 April 2020, Walikota Kendari Sulkarnain akhirnya mengakui kesalahannya, kemudian merevisi isi suratnya dan segera mengklarifikasi isi suratnya. Perbedaan mencolok dari klarifikasi Surat Walikota adalah isi surat sebelumnya adalah meminta warga untuk tinggal di rumah atau melarang warga beraktivitas di luar rumah selama 3 hari berturut-turut, maka pada surat hasil revisi isinya berubah menjadi "menghimbau kepada seluruh masyarakat Kendari agar segera memenuhi kebutuhan dan keperluan hidupnya di luar rumah, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan". Jadi, meskipun Walikota Kendari sudah meminta maaf kepada seluruh warga Kendari, mengakui kesalahannya dan merevisi suratnya melalui video resminya, namun kecemasan, kegaduhan, huru-hara, dan *panic buying* sudah terlanjur terjadi di masyarakat, dan ia tidak bisa dikembalikan lagi normal seperti semula. Faktanya barang-barang, makanan, minuman, dan kebutuhan hidup lainnya untuk persediaan hidup keluarga selama tiga hari telah dibeli, uang telah habis dibelanjakan semua, serta kegaduhan dan kecemasan telah menimpa psikologis individu dan masyarakat. Semuanya sudah terlanjur terjadi dan tidak mungkin dikembalikan lagi, karena itu kekeliruan dan kesalahan tidak perlu disesali. Namun cara terbaik yang dapat dilakukan sekarang adalah melakukan konseling dan terapi individu dan keluarga agar kesehatan mental dan kecemasan masyarakat dapat pulih kembali. Demikian pula Kasus Kedua yaitu isu kedatangan 500 Tenaga Kerja Asing asal China yang merupakan sumber virus Corona; dan Kasus Ketiga tentang kaburnya pasien diduga terinfeksi virus corona dari ruang isolasi Rumah Sakit yang belum jelas terinfeksi virus corona.

Isu yang dibahas di atas yaitu isu Walikota Kendari yang melarang warganya beraktivitas di luar rumah selama tiga hari secara berturut-turut tanpa ada jaminan sosial; isu kedatangan 500 Tenaga Kerja Asing; dan isu kaburnya pasien diduga terinfeksi virus corona dari ruang isolasi Rumah Sakit, menunjukkan bahwa masyarakat memiliki caranya tersendiri dalam merespon perubahan dan mengatasi permasalahan yang ada, baik masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan masalah lainnya.

Terkait larangan bekerja di luar rumah, masyarakat menanggapinya dengan penolakan. Bahwa mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan keluarga jauh lebih penting daripada menghindari penularan virus Corona. Begitu juga dengan kasus penolakan kedatangan 500 orang TKA asal China, yang merupakan sumber virus corona berasal. Bahwa masyarakat masih takut dan trauma, akan terkena-terinfeksi virus Corona, namun pemerintah mengabaikan perasaan warga yang tengah berjuang melawan virus corona dan pemerintah tidak faham dengan kondisi psikologis yang menimpa warga, lalu karena alasan ekonomi, pemerintah justru menerima kedatangan 500 TKA asal China. Selanjutnya kasus terakhir, yaitu kaburnya pasien dari ruang isolasi rumah sakit, didorong oleh keinginan kuat untuk menyelamatkan diri dari tertular virus corona. Pasien kabur dari ruang isolasi karena dia merasa sehat dan tidak terinfeksi virus Corona. Belum ada hasil laboratorium (rapid test, swab, dan sejenisnya) yang menunjukkan bahwa warga bernama Udin terkena COVID-19, tiba-tiba dia sudah diisolasi bersama pasien Corona. Untuk menyelamatkan diri, akhirnya dia kabur dari ruang isolasi, karena dia tidak mau menjadi korban. Kebijakan pemerintah mestinya diarahkan untuk menjaga dan menjamin ketahanan, ketenangan, kenyamanan dan kesejahteraan sosial masyarakat secara umum, bukan malah sebaliknya yaitu pemerintah membuat kebijakan kontroversial yang mengundang kecemasan, kegaduhan, dan gesekan sosial (*conflict*) dalam masyarakat.

Pemerintah Daerah selaku aktor kesejahteraan sosial di daerah, seyogyanya membuat kebijakan yang dapat menyelesaikan masalah, memenuhi kebutuhan warga, dan mensejahterakan masyarakat melalui kebijakan sosial yang dibuatnya. Indikator kesejahteraan sosial masyarakat, yaitu: *Pertama*, masyarakat merasa tenang, nyaman (*comfort*) yaitu kemampuan mengatasi kecemasan, stres dan kendala psikologis yang dialami warga; *Kedua*, masyarakat merasa sehat fisik dan psikis (*health*) karena terhindar dari infeksi virus corona; dan *Ketiga*, adalah masyarakat merasakan kebahagiaan (*happiness*) karena warga mampu bertransformasi, beradaptasi, serta memenuhi kebutuhan sosial-ekonomi, serta terhindar dari penularan virus corona. *Terakhir*, adalah kebijakan pemerintah yang baik adalah kebijakan yang mampu menjawab permasalahan dan tantangan zaman serta memenuhi kebutuhan warga, yang pada akhirnya akan dapat menciptakan suasana kehidupan masyarakat yang nyaman, sehat, bahagia, dan sejahtera.

5. Kesimpulan

Suasana krisis pandemi atau tidak, pemerintah selaku pembuat kebijakan seharusnya membuat kebijakan yang dapat menjawab tantangan dan persoalan zaman, memenuhi kebutuhan masyarakat, serta mensejahterakan masyarakat secara keseluruhan. Bukan sebaliknya, pemerintah malah membuat kebijakan publik yang kontroversial yang dapat memicu timbulnya keresahan dan membuat kegaduhan dalam masyarakat.

Disadari atau tidak, dampak psikososial dari kebijakan pemerintah yang kontroversial tersebut sangat besar terhadap kondisi psikososial individu dan keluarga serta dapat menyebabkan kecemasan dan kebisingan di masyarakat. Karena kebijakan pemerintah yang kurang memperhatikan kondisi psikologis warga, dibuat secara tergesa-gesa dan tanpa koordinasi dengan stakeholders lain, membuat warga menjadi gelisah, cemas, panik, protes, merasa tidak aman, tidak nyaman, tidak sehat, dan tidak sejahtera, sehingga warga melawan dengan caranya masing-masing, sebagai bukti penolakan terhadap kebijakan pemerintah yang kontroversial. Oleh karena itu, pemerintah harus memberikan jaminan perlindungan sosial, ketenangan, keamanan, kenyamanan, kesehatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan kepada masyarakat utamanya kelompok masyarakat kurang mampu dan miskin. Kebijakan pemerintah yang baik (*common good*) pada akhirnya akan menjamin peningkatan imunitas tubuh dan kesejahteraan masyarakat di tengah perjuangan melawan wabah COVID-19.

6. Saran

Pemerintah selaku aktor kesejahteraan sosial, seharusnya melibatkan stakeholders terkait di daerah masing-masing untuk menjamin terpenuhinya prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, *good government* dan *good governance*. Di samping pelibatan stakeholders terkait, pembuatan kebijakan pemerintah juga mestinya memperhatikan kondisi social-ekonomi, kondisi psikologis, potensi, masalah, dan kebutuhan masyarakat, sehingga kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah benar-benar dapat menjawab tantangan zaman, menyelesaikan masalah, dan menciptakan kesejahteraan sosial secara keseluruhan.

Ucapan terimakasih: Terima kasih kepada keempat penulis yang telah menjadi kontributor untuk penulisan artikel dan kepada pimpinan Program Studi, Dekan FISIP-Universitas Halu Oleo, serta Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UHO Kendari yang telah memberikan dukungan dan bantuan dana penelitian yang terkait dengan publikasi artikel ini.

Daftar Pustaka

- Abdullah, I. (2020). *Psychological Trauma : Theory , Research , Practice , and Policy COVID-19 : Threat and Fear in Indonesia*. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1037/tra0000878>
- Almuttaqi, A. I. (2020). Kekacauan respons Indonesia terhadap COVID-19 di Indonesia. *THC Insights*. www.bibiecenter.or.id.
- Bayu, D. J. (2020). Jokowi putuskan PSBB dan status darurat kesehatan atasi Corona. *Katadata.Co.Id*. <https://katadata.co.id/berita/2020/03/31/jokowi-putusan-psbb-dan-status-darurat-kesehatan-atasi-corona>
- Bessant, Judith, Robb Watts, Tony Dalton, and P. S. (2006). *Talking Policy, How Social Policy is Made*. Allen and Unwin.
- Bland, B. (2020). *COVID-10 reveals cracks in Indonesia's leadership*. *Channel News Asia*. <https://www.channelnewsasia.com/news/commentary/covid-19-coronavirus-jokowi-indonesia-government-response-health-12551876>.
- Bridgeman, Peter, G. D. (2004). *The Australian Policy Handbook*. Allen and Unwin.
- Brown, P. (2020). Studying COVID-19 in light of critical approaches to risk and uncertainty: research pathways, conceptual tools, and some magic from Mary Douglas. *Health, Risk and Society*, 22(1), 1–14. <https://doi.org/10.1080/13698575.2020.1745508>
- Djalante, R., Lassa, J., Setiamarga, D., Sudjatma, A., Indrawan, M., Haryanto, B., Mahfud, C., Sinapoy, M. S., Djalante, S., Rafliana, I., Gunawan, L. A., Surtiari, G. A. K., & Warsilah, H. (2020). Review and analysis of current responses to COVID-19 in Indonesia: Period of January to March 2020. *Progress in Disaster Science*, 6, 100091. <https://doi.org/10.1016/j.pdisas.2020.100091>
- Dye, T. R. (2002). *Understanding Public Policy*. (ed. 10). *Upper Saddle River*. Prentice Hall.
- Gudi, S. K., & Tiwari, K. K. (2020). Preparedness and lessons learned from the novel coronavirus disease. *International Journal of Occupational and Environmental Medicine*, 11(2), 108–112. <https://doi.org/10.34172/ijoem.2020.1977>
- Karyono, A. (2020). *Kerjasama Luar Negeri Dalam Upaya Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Sosial, webinar membangun kerjasama mitra internasional dalam penanganan pandemi Covid-19, Tanggal 6 Mei 2020*.
- Manser, M. H. (1995). *Oxford Learner's Pocket Dictionary New Edition*. Oxford University Press.
- Mas`udi, W., & Winanti, P. S. (2020). *Tata Kelola Penanganan Covid-19 di Indonesia: Kajian Awal*. Gadjah Mada University Press.
- Midgley, J. (2005). *Pembangunan Sosial: Perspektif Pembangunan Dalam Kesejahteraan Sosial*. Ditperta Depag RI.
- Neuman, W. L. (2006). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. 6Th Edition. Pearson Education, Inc.
- Sebayang. (2020). *Alert! WHO resmi tetapkan Corona pandemic*. cnbcindonesia.com. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200312064200-4-144245/alert-who-resmitetapkan-corona-pandemi>
- Sigit, A. (2020). *Ada warga dikucilkan karena PDP corona di Salatiga*. *Krjogja*. Retrieved from: <https://www.krjogja.com/berita-lokal/jateng/semarang/ada-warga-dikucilkan-karena-pdp-corona-ini-reaksi-walikota-salatiga>
- Spicker, P. (1995). *Social Policy: Themes and Approaches*. Prentice Hall.
- Suharto, E. (2008). *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik; Peran pembangunan kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial dalam mewujudkan negara kesejahteraan (welfare state) di Indonesia*. Penerbit Alfabeta.

- Sultranews.co.id. (2020). *Polres Kendari Bantah informasi warga akan diamankan jika kedatangan keluar rumah*. <https://sultranews.co.id/5342-polres-kendari-bantah-informasi-warga-akan-diamankan-jika-kedatangan-keluar-rumah>
- Surat Instruksi Walikota Kendari Nomor 443.1/1233/2020 Tentang Melakukan Total Aktivitas di Dalam Rumah Selama Tiga Hari (10-12 April 2020) Dalam Rangka Memutus Mata Rantai Penyebaran Viruscorona Disease (COVID-19) di Kota Kendari. (n.d.).
- Syamsulhakim, E. (2020). *Peran Bank Dunia Dalam Mendukung Penanganan Wabah Covid-19 di Indonesia. Presentasi disampaikan pada Webinar "Membangun Kerja Sama Pembangunan Internasional Dalam Penanganan COVID-19" Hari Rabu, Tanggal 6 Mei 2020*.
- Tuwu, D. (2020). Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19. *Journal Publicuho*, 3(2), 267–278. <https://doi.org/10.35817/jpu.v3i2.12535>
- Utami, S. D. (2020). *Materi Webinar. Efek Pandemi Covid 19 terhadap Gangguan Mental Terhadap Masyarakat dan Penderita Covid 19. Hari Jumat, Tanggal 8 Mei 2020*.
- Www.reformasineews.com. (2020). *Terungkap ini alasan menaker memberi izin 500 TKA China masuk Sultra*. <https://www.reformasineews.com/terungkap-ini-alasan-menaker-memberi-izin-500-tka-china-masuk-sultra>
- Yin, R. K. (2008). *Case Study : Design and Method*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Yunus, N.R, A. R. (2020). Kebijakan Pemberlakuan Lockdown Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19. *SALAM: Jurnal Sosial & Budaya Syar-I*, 7(3), 227–238. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i3.15083>.



Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).
Published under licence by Sosio Konsepsia.